

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arto, Mukti. 2005. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. Ke 6. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Peradilan Agama di Indonesi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pelita IV.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet. Ke 1. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. 1. Pustaka Pelajar.
- Gultom, Elfrida R. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*, cet. 1. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- HS, Salim dan Erlies Septiani Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan disertai*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad Abi Abdillah bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1 (Darul Fikr).
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*. Cet. 3. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. 1, Edisi ke 6. Yogyakarta: Liberti.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*. Cet. Ke 3. Jakarta: Djambatan.
- MK, Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia masalah-masalah krusial*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Nashriana. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Warjono. 1970. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Penerbit Sumur Bandung.
- Qudamah, Ibnu. 2013. *Al-Mughni* Jilid 10. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rasaid, M. Nur. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Cet. IV. Jakarta: sinar Grafika.
- Sayyid Sabiq. 2012. *Fiqih Sunnah*, Juz II. Semarang:Toha Putra.
- Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2005. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Sarwono. 2014. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Ed. 1. Cet. Ke 4. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio. 1979. *Kamus Hukum*. Cet. Ke 4. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Cet. 1 Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabri, M. Alisuf. 2010. *Psikologi Pendidikan berdasarkan Kurikulum Nasional*. Jakarta: Pedoman Ilmu Raya.
- Termorshuizen, Marjanne. 1999. *Kamus Hukum Belanda*. Jakarta: Djambatan.
- Tim Pustaka Phoenix. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indoenesia*. Jakarta: Pustaka Phoenix.
- Zaidah, Yuzna. 2015. *Peradilan Agama di Indonesia*. Banjarmasin.

JURNAL

- Wijayanta, Tata. *et al. eds.* 2010. "Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal." *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No 3.

SKRIPSI

Aziz, Muhammad Hamid Abdul. 2017. "Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015." Skripsi sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Fransisca, Hana Maria. 2009. "Asas Hakim Dalam Praktek Peradilan Perdata" Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Latif, Muhammad. 2015. "Pemberian Nafkah Anak Oleh Ayah Kandung Setelah Perceraian Studi Kasus Keluarga Broken Home Pada Siswa di MAN Salatiga." Skripsi sarjana, IAIN Salatiga.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Departemen Agama R. I. 2000. *Kmpilasi Hukum Islam*. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam.

HerzienInlandschReglement (H.I.R).

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.